



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023**



TAHUN 2023



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**
Jabatan : BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	18
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percent (%)	88
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	Percent (%)	100
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	Percent (%)	7,90
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	1,59

Jumlah Anggaran : Rp. 13.260.599.456,-
Program : 12

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.590.618.920,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.197.656,-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.622.000,-
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.999.700,-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.799.564,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	277.712.000,-
2.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100.000.000,-
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	177.712.000,-

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
3.	Program Rehabilitasi Sosial	400.000.000,-
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	310.000.000,-
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90.000.000,-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.348.466.650,-
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.348.466.650,-
5.	Program Penanganan Bencana	250.078.000,-
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.000.000,-
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.078.000,-
6.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.000.000,-
6.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
6.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
7.	Program Perlindungan Perempuan	414.818.492,-
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.499.992,-
7.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500,-
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000,-
8.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,-
8.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,-
9.	Program Perlindungan Khusus Anak	370.033.394,-
9.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.033.394,-

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
9.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-
10.	Program Pengendalian Penduduk	178.200.000,-
10.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000,-
10.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.200.000,-
11.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.084.572.000,-
11.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.350.000,-
11.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	552.600.000,-
11.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	309.622.000,-
11.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	412.000.000,-
12.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.096.100.000,-
12.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.016.100.000,-
12.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,-
	JUMLAH	13.260.599.456,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI



H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

Plt.KEPALA OPD



M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**
Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA OPD

SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	18
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percent (%)	88
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	Percent (%)	100
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	Percent (%)	7,90
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	1,59

Jumlah Anggaran : Rp. 13.260.599.456,-
Program : 12

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.590.618.920,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.197.656,-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.622.000,-
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.999.700,-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.799.564,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	277.712.000,-
2.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100.000.000,-
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	177.712.000,-

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
3.	Program Rehabilitasi Sosial	400.000.000,-
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	310.000.000,-
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90.000.000,-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.348.466.650,-
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.348.466.650,-
5.	Program Penanganan Bencana	250.078.000,-
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.000.000,-
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.078.000,-
6.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.000.000,-
6.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
6.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
7.	Program Perlindungan Perempuan	414.818.492,-
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.499.992,-
7.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500,-
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000,-
8.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,-
8.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,-
9.	Program Perlindungan Khusus Anak	370.033.394,-
9.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.033.394,-

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
9.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-
10.	Program Pengendalian Penduduk	178.200.000,-
10.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000,-
10.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.200.000,-
11.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.084.572.000,-
11.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.350.000,-
11.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	552.600.000,-
11.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	309.622.000,-
11.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	412.000.000,-
12.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.096.100.000,-
12.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.016.100.000,-
12.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,-
	JUMLAH	13.260.599.456,-

Selatpanjang, 14 Februari 2023

BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI



H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

Plt.KEPALA OPD



SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**

Jabatan : BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Percent (%)	95
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73,56

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.590.618.920,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.197.656,-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.622.000,-
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.999.700,-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.799.564,-
	JUMLAH	4.590.618.920,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI



H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKRI, SE**

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**

Jabatan : BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Percent (%)	95
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73,56

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.590.618.920,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.197.656,-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.622.000,-
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.999.700,-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.799.564,-
	JUMLAH	4.590.618.920,-

Selatpanjang, 14 Februari 2023

BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI



H. MUHAMMAD ADIL, SH,MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SOSIAL


M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005


SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Percent (%)	78
2	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Orang	30.178
3	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Percent (%)	85
4	Meningkatkan Penanganan Bencana terhadap Korban Bencana	Persentase korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Percent (%)	90

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	277.712.000,-
1.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100.000.000,-
1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	177.712.000,-
2.	Program Rehabilitasi Sosial	400.000.000,-
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	310.000.000,-
2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90.000.000,-
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.348.466.650,-
3.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.348.466.650,-
4.	Program Penanganan Bencana	250.078.000,-
4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.078.000,-
	JUMLAH	3.276.256.650,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD



M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL



SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHABIBI, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 2 Maret 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SOSIAL

NURHABIBI, SE

NIP. 19770122 201102 1 001

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Percent (%)	78
2	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Orang	30.178
3	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Percent (%)	85
4	Meningkatkan Penanganan Bencana terhadap Korban Bencana	Persentase korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Percent (%)	90

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	277.712.000,-
1.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100.000.000,-
1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	177.712.000,-
2.	Program Rehabilitasi Sosial	400.000.000,-
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	310.000.000,-
2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90.000.000,-
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.348.466.650,-
3.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.348.466.650,-
4.	Program Penanganan Bencana	250.078.000,-
4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.078.000,-
	JUMLAH	3.276.256.650,-

Selatpanjang, 2 Maret 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD



SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL



NURHABIBI, SE

NIP. 19770122 201102 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Percent (%)	30
2	Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Percent (%)	100
3	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Lembaga/ Anak	115
4	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Percent (%)	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	150.000.000,-
1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
2.	Program Perlindungan Perempuan	326.159.992,-
2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.499.992,-
2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000,-
3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,-
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	50.000.000,-
4.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-
	JUMLAH	626.159.992,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK

DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Percent (%)	30
2	Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Percent (%)	100
3	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Lembaga/ Anak	115
4	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Percent (%)	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	150.000.000,-
1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-
2.	Program Perlindungan Perempuan	326.159.992,-
2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.499.992,-
2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000,-
3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,-
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	50.000.000,-
4.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-
	JUMLAH	626.159.992,-

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD



SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK



DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TARMIZI, SE, M.IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

TARMIZI, SE, M.IP
NIP. 19770403 200901 1 008

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penguatan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Dokumen	1
2.	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Percent (%)	72
3.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Percent (%)	76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengendalian Penduduk	178.200.000,-
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000,-
1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.200.000,-
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.084.572.000,-
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.350.000,-
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	552.600.000,-
2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	309.622.000,-
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	412.000.000,-
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.096.100.000,-
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.016.100.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,-
	JUMLAH	4.358.872.000,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TARMIZI, SE, M.IP
NIP. 19770403 200901 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TARMIZI, SE, M.IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

TARMIZI, SE, M.IP
NIP. 19770403 200901 1 008

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penguatan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Dokumen	1
2.	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Percent (%)	72
3.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Percent (%)	76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengendalian Penduduk	178.200.000,-
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000,-
1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.200.000,-
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.084.572.000,-
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.350.000,-
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	552.600.000,-
2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	309.622.000,-
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	412.000.000,-
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.096.100.000,-
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.016.100.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,-
	JUMLAH	4.358.872.000,-

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD



SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



TARMIZI, SE, M.IP
NIP. 19770403 200901 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. NIZAR, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

M. NIZAR, S.Sos
NIP. 19831217 201001 1 016

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	33
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	13
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	Paket	5
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan-Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20
7	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	137
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Unit	25

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,-
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.197.656,-
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.197.656,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.622.000,-
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000,-
3.3	Penyediaan bahan Logistik Kantor	10.000.000,-
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,-
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,-
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,-
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.622.000,-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.799.564,-
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.399.564,-
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664.400.000,-
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.999.700,-
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.700,-
	JUMLAH	4.590.618.920,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

M. KHARDAFL, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

M. NIZAR, S.Sos
NIP. 19831217 201001 1 016



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. NIZAR, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUKRI, SE**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

M. NIZAR, S.Sos

NIP. 19831217 201001 1 016

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	33
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	13
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	Paket	5
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan-Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20
7	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	137
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Unit	25

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,-
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.197.656,-
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.197.656,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.622.000,-
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000,-
3.3	Penyediaan bahan Logistik Kantor	10.000.000,-
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,-
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,-
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,-
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.622.000,-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.799.564,-
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.399.564,-
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664.400.000,-
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.999.700,-
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.700,-
	JUMLAH	4.590.618.920,-

Selatpanjang, 14 Februari 2023

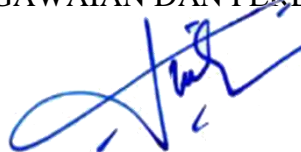
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN



M. NIZAR, S.Sos

NIP. 19831217 201001 1 016



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNAWAR KHALIL, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PROGRAM

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

MUNAWAR KHALIL, S.Sos M.Si
NIP. 19811123 201102 1 002

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
4	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
6	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
7	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
8	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil	Laporan	25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN



MUNAWAR KHALIL, S.Sos M.Si
NIP. 19811123 201102 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNAWAR KHALIL, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PROGRAM

MUNAWAR KHALIL, S.Sos M.Si
NIP. 19811123 201102 1 002

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
4	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
6	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
7	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
8	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil	Laporan	25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN



MUNAWAR KHALIL, S.Sos M.Si

NIP. 19811123 201102 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MHD.TAUFIQ MUBAROK, SKM**
Jabatan : **KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KHARDAFI, SE, M.IP**
Jabatan : **Plt.KEPALA OPD**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

MHD.TAUFIQ MUBAROK, SKM
NIP. 19870408 201407 1 001

Organisasi Perangkat Daerah	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	15
2	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50
3	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	55

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500,-
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500,-
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.033.394,-
2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	270.033.394,-
	JUMLAH	408.691.894,-

Selatpanjang, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP. 19771118 200901 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

MHD.TAUFIQ MUBAROK, SKM
NIP. 19870408 201407 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. KAMISAH, M.Pd.I**
Jabatan : **KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUKRI, SE**
Jabatan : **Plt.KEPALA OPD**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 14 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD

SUKRI, SE
NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. KAMISAH, M.Pd.I
NIP. 19690219 199401 2 001

	:	(a)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran	:	(b)	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	15
2	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50
3	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	55

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500,-
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500,-
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.033.394,-
2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	270.033.394,-

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	JUMLAH	408.691.894,-

Selatpanjang, 14 Februari 2023

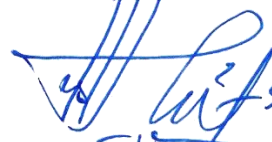
PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA OPD



SUKRI, SE

NIP.19800401 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK



Dra. KAMISARI, M.Pd.I

NIP. 19690219 199401 2 001